

ANALISIS MODEL DATA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DINAS PENDAPATAN DAERAH BANDUNG

Oleh : Nur Zeina Maya sari, SE,MM

Abstrak

Kualitas Informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi akan berdampak pada tingkat kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan dan keputusan yang terkait dengan operasional perusahaan serta menyiapkan laporan keuangan yang efektif. Sistem Informasi Akuntansi sangat penting dalam perkembangan Proses bisnis Dinas pendapatan Asli Daerah Kotamadya Bandung.

Teknik ini mengenai model data Sistem Informasi Akuntansi yang berdampak pada pendapatan, khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) . *Database* sistem memiliki fungsi terhadap tanggungjawab pendapatan yang terdiri atas piutang Pajak belum tertagih, piutang pajak tertagih, dan total piutang. Sistem informasi akuntansi memiliki model yang berbeda terhadap *business process* dan terhadap informasi akuntansi pemerintah kotamadya Bandung

Key Words: Analisis Data Modeling, Informasi Akuntansi, ERD, Database, Pendapatan Asli Daerah

1. Latar Belakang

Sistem Informasi Akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan yang baik sangat diperlukan untuk akuntabilitas unit, khususnya Dinas Pendapatan Daerah. Perda no 20 Tahun 2012 menjabarkan pedoman komprehensif atas pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akuntansi keuangan daerah. Perwal 386 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan mendefinisikan sistem akuntansi sebagai rangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bersifat *self assessment*. Prosedur tersebut mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan daerah dan standar akuntansi keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kotamadya Bandung masih melaksanakan akuntansi berdasarkan perda no 20 tahun 2012 berdampak pada perubahan pada pelaksanaan sistem akuntansi yang dilaksanakan, yang awalnya *official assessment* menjadi *self assessment*, sehingga terdapat perubahan terhadap aktivitas sumber daya manusia yang menjalankan dan arus data.

Arus Penerimaan dan Pengeluaran Kas harus diastikan dijalankan dengan taat azas, dalam arti adanya kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Sementara itu, salah satu komponen penting dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah perencanaan dan analisis data. Model struktur data yang dirancang dengan baik memberikan tingkat akurasi dan relevansi yang lebih tinggi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, tanpa terganggu oleh perubahan *coding* aplikasi.

Dari berbagai faktor latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengembangkan suatu rancangan model data dengan menggunakan model semantik *Entity Relationship Model* untuk akuntansi penerimaan kas khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah

2. Perumusan Masalah

Konteks penerapan basis data pada model akuntansi penerimaan kas PAD, rumusan masalah yang dipandang penting adalah:

1. Bagaimana analisa prosedur sistem informasi akuntansi penerimaan kas pendapatan Asli Daerah Dispenda berdasarkan Perda No.20/2012 ?
2. Bagaimana aktivitas penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah kotamadya Bandung?
3. Bagaimana aktivitas pengeluaran Kas Pendapatan Asli Daerah kotamadya Bandung?
4. Bagaimana data dokumen dan model data logical yang sesuai menurut prosedur akuntansi?

5. Tinjauan Pustaka

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. (Perntice Hall 2014:238)

Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain :

- Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran) dalam bentuk target tahunan, penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) yaitu Realisasi Pajak Daerah dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.

SIA terdiri dari 3 subsistem:

- Sistem pemrosesan transaksi mendukung proses operasi bisnis harian.
- Sistem buku besar/ pelaporan keuangan
- Sistem Penutupan dan pembalikan. Merupakan pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup

Romney dan Steinbart (2006:118) menegaskan bahwa profesi akuntan cukup sering terlibat dalam pengembangan skema tingkat konseptual dan eksternal yang mengindikasikan keterkaitan yang kuat antara sistem akuntansi terhadap proses bisnis dari organisasi. Hal ini yang menjadikan profesi akuntan sebagai profesi yang dipandang paling memahami aktifitas dan data proses bisnis.

Berbagai literatur dan peneliti dalam bidang analisis data telah banyak menawarkan solusi, untuk model data apa yang memenuhi kebutuhan model data di tingkat konseptual. Suatu model data konseptual yang baik harus menjelaskan makna semantik dari subyek. *Entity Relationship Model (ERM)* merupakan suatu model yang secara luas digunakan dan dipercaya memberikan pemaknaan semantik yang baik kepada pengguna, analis dan pengembang aplikasi. ERM memberikan kelebihan dibandingkan model data konseptual lain dalam hal fleksibilitas dan kemampuan ekspresi (*expressiveness*) atas semantik hubungan dari entitas dengan entitas lainnya dan hubungan antara entitas dengan atribut entitas tersebut.

4. Metode Penelitian

Seperti layaknya metodologi penelitian di bidang teknik dan komputer, maka peneliti disini mengadopsi suatu metodologi yang berbasis pada metode deskriptif, analitik pada perancangan dan bersifat normatif. Berbeda dengan penelitian akuntansi lain yang biasanya berbasis positif dan memandang pada satu aspek perancangan tanpa adanya analisis dan penggambaran terhadap objek yang diteliti, penelitian ini menekankan pada upaya memecahkan masalah dengan memberikan model solusi yang dianggap terbaik untuk suatu permasalahan. Sama halnya dengan penelitian empiris, pengumpulan data juga digunakan, begitu pun studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam merancang model data.

4.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan adalah proses bisnis penerimaan atau pendapatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung dan Model Data yang perlu dirancang menurut Perda no 20 Tahun 2012. Adapun unit analisis yang dimasukkan adalah unit yang mengelola keuangan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. Karena penyebutan nama yang berbeda-beda dan pengelolaan keuangan yang relatif terpusat di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

5. Hasil Dan Pembahasan

Semua penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sejumlah penerimaan tersebut, yang masuk dalam pengelolaan SKPD umumnya adalah Pendapatan Asli Daerah.

5.1 Objek Penerimaan

Berdasarkan acuan Perda No 20 Tahun 2012 dan hasil observasi yang dilakukan maka tidak semua SKPD memiliki bendahara penerimaan. Pada Kotamadya Bandung, prosedur penerimaan ditetapkan pada dinas/badan/lembaga/kantor yang memiliki kewajiban pemungutan atau pemotongan retribusi/pajak seperti dibawah ini:

1. Pajak Daerah:
2. Retribusi Daerah:
3. BUMD/BLUD:

5.2 Prosedur Penerimaan Bendahara

Penerimaan Pelaksanaan prosedur penerimaan

setoran terdiri atas:

1. Penyetoran yang melalui bendahara penerimaan

Secara administratif, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada

Pengguna Anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya namun secara fungsional, bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD selaku BUD.

2. Penyetoran yang melalui bendahara penerimaan pembantu

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Dengan demikian, dalam suatu SKPD hanya akan terdapat satu bendahara penerimaan, tetapi dimungkinkan terdapat lebih dari satu bendahara penerimaan pembantu

3. Penyetoran yang melalui badan, lembaga keuangan, atau kantor pos

Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dengan disetor langsung ke bank tidak membutuhkan Surat Tanda Setoran dari Bendahara Penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan membuat Bukti Setoran untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga dan Nota Kredit untuk diberikan kepada BUD.

4. Pertanggungjawaban Penerimaan Setoran

Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan Perwal 386 tahun 2012. Proses ini merupakan tahap lanjutan dari penatausahaan penerimaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

5.3 Perancangan Model Data Proses Akuntansi Penerimaan

5.3.1 Dokumen yang terkait

Hasil wawancara dan observasi proses bisnis mengindikasikan bahwa terdapat beberapa item yang datanya perlu disimpan dalam tabel dan beberapa laporan yang komposisi datanya diperoleh dari data yang disimpan tersebut. Untuk memperolehnya perlu dilakukan identifikasi dokumen apa saja yang terlibat. Dokumen yang terlibat menurut Perda N 20 tahun 2012 antara lain:

5.3.2 Kebutuhan Informasi

Dalam proyek pengembangan sistem informasi yang berbasis model, model data harus berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna dan pemilik sistem dalam hal ini (PPK-SKPD dan PPKD) menghendaki agar sistem yang dirancang harus memenuhi kriteria sistem informasi yang berkualitas.

Berkualitas di sini diterjemahkan sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, cepat diambil, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa terdapat sistem terdistribusi yang saling berinterkoneksi, maka perlu dipetakan informasi mana yang perlu dijadikan data master, data transaksi dan data mana yang merupakan laporan. Dengan menggunakan konsep relasional, baik data master dan data transaksi akan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan proses bisnis penerimaan di lingkungan Kota Bandung.

Tabel 1 dibawah ini memetakan status mengenai item-item tersebut:

Data	Laporan
Data Master: Data Kode Urusan Pemerintahan Data Kode Fungsional Data Kode Organisasi/SKPD Data Kode Program Data Kode Kegiatan Data Kode Bagan Akun Data Kode Bank Data Wajib Pajak, Alamat WP dan Data Karyawan/Pegawai Data Transaksi: Penerimaan SKPD Terima SKPD Detail Penerimaan SKRD Terima SKRD Detail	Data RKA-SKPD Data DPA-SKPD LRA SKPD Neraca SKPD Catatan atas Laporan Keu SKPD Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Buku Besar Buku Besar Pembantu Buku Kas Umum Penerimaan

STS Detail	
STS_Bank Data	

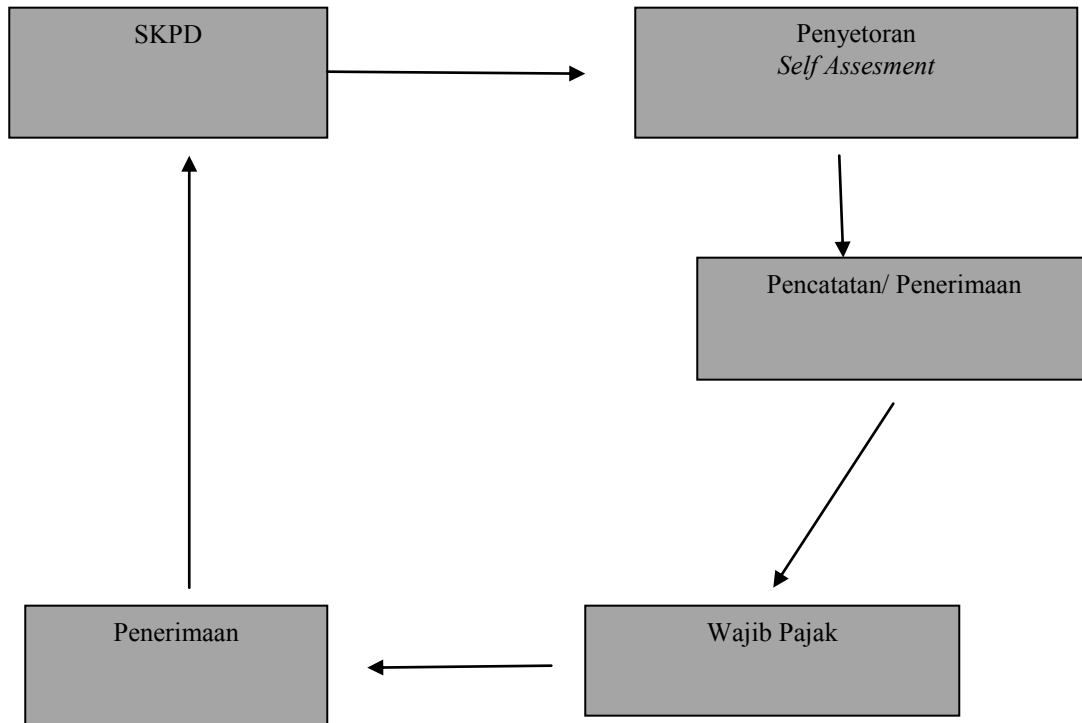
Sumber : Hasil Penelitian Penulis 2014

Enterprise Data Model (EDM)

Suatu model data menyeluruh (*enterprise data model*) perlu dirancang untuk menggambarkan data dalam hirarki yang paling tinggi. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan pengguna rancangan logikal dari model sebelum selanjutnya dibuat rancangan model data yang lebih detail. Dengan melihat dari ruang lingkup sistem penerimaan yang diobservasi berikut transaksi-transaksi apa saja yang dilakukan, maka terdapat 4 (empat) entitas yang menggambarkan proses bisnis secara menyeluruh. Empat entitas ini diperoleh dari analisis terhadap dokumen yang terkait, dan juga identifikasi data potensial yang perlu disimpan. Entitas-entitas tersebut adalah

- (1) Penerimaan Kas besar maupun kas kecil ,
- (2) Penyetoran Uang Ke Bank,
- (3) Pelaksanaan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Uang,
- (4) Penjurnalan tiap transaksi
- (5) Buku Besar
- (6) Neraca Saldo dan worksheet
- (7) Pelaporan Keuangan

. Gambar 1 menunjukkan Enterprise Data Model Sistem Informasi Akuntansi
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Bandung.



**Gambar 1 EDM SIA Penerimaan Kotamadya Bandung dan
Sumber :Data Diolah Penulis 2014.**

5. Meta Data/ Repositori Data

Entitas atau tabel yang perlu disimpan datanya dengan bersumber dari EDM. Data/entitas tersebut dirangkum pada repositori data berikut (Tabel 2):

Fungsi	Kode_Fungsi	Identifler
Organisasi/SKPD	Kode_SKPD	Identifler
	Jns_SKPD	Tipe

Program	Kode_Program	Identifier
	Nama_Program	Nama program menurut
Kegiatan	Kode_Keg	Identifier
	Nama_Keg	Nama Kegiatan
Bagan Akun	Kode_Re	Identifier
	k KS	Kode Saldo (+ bertambah; - berkurang)
	Level	Tingkatan untuk penjumlahan
		Nama Akun akuntansi
Wajib Pajak	Kode_WajibBay	Identifier
	ar Nama_WB	Nama Wajib Pajak/Pungut
	Alamat	Alamat
	Kecamatan	Kecamatan
	Kelurahan Telp	Kelurahan
	Fax	Telp
	Status	Fax
Karyawan	No_Pegaw	Identifier
	ai Nama	Nama Karyawan yg menginput
	KPNS	Kartu PNS
	Pangkat	Pangkat
Bank	Kode_Bank	Identifier
	Nama_Bank	Nama Bank Rekanan Pemda
	Alamat_Bank	Alamat Bank Rekanan Pemda
	No_Telepon	No Telepon
	No_Fax	No Fax
	Terdaftar	Status terdaftar di BI

SKP	Kode_SK	Identifier
	Jt Temp	Tanggal Jatuh Tempo
Baris SKP	Kode_SK	Primary Foreign Key
	P	Primary Foreign Key
	Kode_Re	Deskripsi transaksi
SKR	Kode_SK	Identifier
	R Masa	Bulan
Baris SKR	Kode_SK	Primary Foreign Key
	R	Primary Foreign Key
	Kode_Rek	Deskripsi transaksi
STS	Kode_ST	Identifier
Baris STS	Kode_ST	Primary Foreign Key
	S	Primary Foreign Key
SKPD_Program	Kode_SKPD	Primary Foreign
Jurnal	IdTrans	Identifier
Penerimaan Kas	Tgl	Tanggal Penjurnalan
	Keteranga	Keterangan yang
STS_Bank	Kode_Bank	Primary Foreign

Tabel. 2. Data Model Rasional 2014

Transaksi PAD

Setiap transaksi perlu ada buktinya. Kegunaan bukti transaksi adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Di samping itu, bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan, apabila terjadi masalah di kemudian hari. Bukti transaksi dapat berasal dari perusahaan sendiri atau diperoleh dari pihak luar. Bukti transaksi dari pihak luar lebih kuat dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan sendiri.

Jurnal

Setiap ayat jurnal terdiri paling tidak satu perkiraan yang di debit dan satu perkiraan yang dikredit. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit.

Jurnal umum ini terdiri dari :

Tanggal

Nomor bukti

keterangan

Referensi

Debit

Kredit

Posting ke buku besar

Setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku besar.

Neraca Saldo

Kadang-kadang disebut juga neraca sisa atau neraca percobaan : daftar saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu.

Penyesuaian

Dibuatnya ayat jurnal penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu pada hakikatnya adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal yang sebenarnya.

Worksheet

Neraca lajur (work sheet) adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur, dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Disamping itu, neraca lajur juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan, dan memungkinkan penyusunan data secara logis.

Laporan Keuangan

Neraca

Laporan laba-rugi

Perubahan modal

Laporan Arus kas

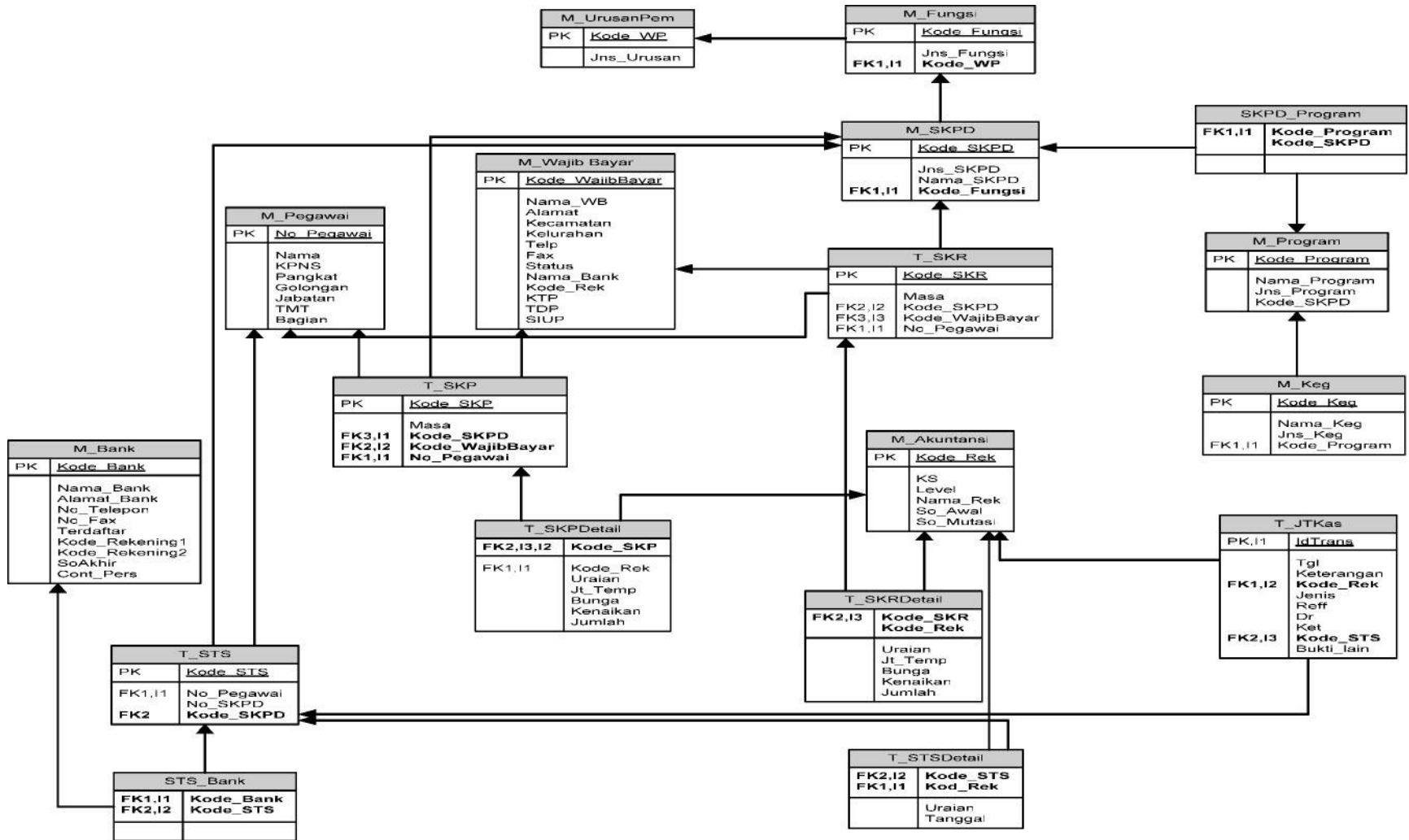
Catatan atas laporan keuangan

Dari Proses bisnis yang ada kemudian diturunkan menjadi aturan bisnis (*business rules*). Dengan apemetaan bisnis, dan aturan bisnis yang dinilai berdasarkan asersi struktural dan tindakan (Hoffer, Prescott, McFadden, 2005). Dengan memperhatikan EDM, pola-pola aturan bisnis, dan dokumen terkait, maka dapat diturunkan sebuah model data komprehensif yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan informasi.

5.3.5 Model Data Relasional Logikal

Teknologi relasional dengan model rasional sangat efektif terhadap aktivitas penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah. Gambar 2 menunjukkan model relasional kemudian diturunkan menjadi model data fisik yang diturunkan dari prototipe aplikasi. Proses bisnis dan kebutuhan informasi dapat memudahkan upaya konversi dari konseptual ke sistem fisik. Tanpa perencanaan yang efektif kebutuhan informasi, pengembangan database akan bersifat tidak terkendali akibat penambahan yang baru disadari di kemudian hari

membentuk sebuah model yang stabil untuk pengembangan aplikasi lunak Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Gambar 4 Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah 2014

6. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi yang berbasis sistem informasi akuntansi pendapatan kas yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Instrumen penelitian yang banyak digunakan adalah aplikasi pemodelan data dan observasi proses bisnis. Hasil observasi dan studi menunjukkan beberapa hal yang akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini:

1. Pemda Kotamadya Bandung khususnya Dispenda membutuhkan perangkat aplikasi yang sudah mengacu pada perda no 20 tahun 2012 sehingga efektifitas Dinas dapat dijalankan dengan Baik. Selain kepatuhan Tugas Pokok dan fungsi terhadap peraturan, Pemda Kotamadya Bandung juga menyadari bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dalam aktifitas akuntansi sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga fungsi analisis *control system informasi* akuntansi terhadap Pajak Daerah merupakan satu hal yang penting dalam penerimaan kas SKPD.
2. Keputusan Kepala Dinas dan Kasie dalam aktifitas maksimalisasi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dengan memetakan kebutuhan informasi ke dalam model data keputusan. Dengan teknologi data relasional dan pemodelan semantik menunjukkan bahwa proses penerimaan daerah dapat lebih terarah.
3. ERD berupa Model data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pendapatan Asli Daerah yang dirancang mampu memberikan informasi akuntansi mengenai pihak yang berkontribusi kepada pendapatan asli daerah (Wajib Pajak), peristiwa yang perlu direkam dalam penerimaan daerah, formulir dan dokumen yang dapat ditelusuri pada saat menyeter, dan proses pencatatan akuntansi yang memungkinkan pelaporan keuangan atas aktifitas penerimaan dapat dihandalkan.

SARAN

Terlepas dari kesimpulan di atas, kiranya peneliti juga melihat beberapa poin yang menantang untuk disikapi bagi peneliti selanjutnya:

1. Analisis sitem Informasi Akuntansi Penerimaan daerah harus memuat model sekaligus control dalam analisa pengambilan keputusan para user , khususnya para kepala dinas, kepala bagian dan kasie.
2. Penelitian yang bersifat normatifperancangan data tanpa adanya analisis system informasi akuntansi , diperlukan lebih lanjut pengujian empiris untuk menjawab apakah kebutuhan informasi Penerimaan Kas Daerah dapat terpenuhi. Hal in berarti membuka jalan bagi rekan peneliti lainnya maupun peneliti sendiri untuk menggali lebih dalam pengaruh penerapan SIA atau pun model data ini bagi keberhasilan perancangan aplikasi SIA penerimaan di Kotamadya Bandung.
3. Kerbatas pada model data aktifitas penerimaan SKPD saja, sementara aktifitas yang jauh lebih besar dan menantang menanti untuk dipecahkan di tingkat yang lebih tinggi semisal SKPKD, dan Propinsi. Penting kiranya untuk mengupayakan sinkronisasi model data dalam pengembangan software aplikasi keuangan, mengingat SKPD pada akhirnya akan dikonsolidasi di tingkat SKPKD dalam pelaporan keuangan.

Nur Zeina Maya Sari,SE,MM

Adalah Dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Langlangbuana Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, 2012, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2012, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Prescott, Fred R. McFadden, 2012, 9th Ed., *Modern Database Management* 9th Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Mulyadi. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba

Pemkot. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pemkot. 2007. *Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Romney, Marshall B. and Steinbart, Paul J. 2011. *Accounting Information Systems*, 12/e. Prentice Hall Business Publishing

Weygandt, Jerry J., Donald E. Kieso, and Paul D. Kimmel 2005. *Accounting Principles*,

